

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia masih mengalami permasalahan masyarakat yang sangat kompleks, dimulai dari permasalahan di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan¹. Kendala utama yang dihadapi di setiap daerah hampir sama yaitu bersumber dari permasalahan kependudukan. Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun terus bertambah banyak, dan menimbulkan banyak masalah sosial diantaranya pengangguran, kriminalitas, rendahnya kualitas kesehatan, minimnya akses pendidikan dan kekurangan bahan pangan bahkan gizi buruk².

Permasalahan tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Beberapa cara dilakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah penduduk agar tidak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun diantaranya adalah, menggalakkan program transmigrasi, pemerataan lapangan kerja, membuat Undang-Undang yang menetapkan usia minimal menikah, meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar hingga 12 tahun bagi masyarakat, membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga 2 anak, hingga menekan pertumbuhan penduduk dengan program KB yang berslogan “2 Anak Cukup”.

¹ Zahwanda Anasty Prasadewi, *Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*.

(<https://www.kompasiana.com/zhahwandaap/5daea10d097f3616a0692b22/pengangguran-dan-pengaruhnya-terhadap-tingkat-kemiskinan-di-indonesia> , diakses 31/01/2020).

² Andri Hartik, *Kepala BKKBN : Laju Pertumbuhan Penduduk 4 Juta Per Tahun Idealnya 2 Juta..* (<https://regional.kompas.com/read/2016/09/26/11312561/kepala.bkkbn.laju.pertumbuhan.penduduk.4.juta.per.tahun.idealnya.2.juta> , diakses 31/01/2020).

Beberapa program tersebut ternyata tidak dapat menjawab tantangan untuk menekan jumlah penduduk Indonesia yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dijelaskan dalam pasal 19 ayat 2 pengendalian kuantitas penduduk dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan pengurangan mobilitas penduduk³. Pada Undang-Undang ini jelas bahwa pengendalian penduduk harus dilakukan. Jika tidak tentu adanya ketidakseimbangan antara daya tampung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang tidak dapat mengendalikan angka kelahiran. Tidak hanya itu perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sarannya jauh lebih luas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁴.

Dengan begitu pemerintah mengupayakan program agar permasalahan penduduk bisa berkurang. Program tersebut mengacu pada program prioritas pembangunan (Nawacita) Presiden Jokowi Ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ke-5 meningkatkan kualitas hidup manusia, dan yang ke-8 revolusi karakter, melalui BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional). Kemudian disepakati agar BKKBN segera membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). BKKBN sebagai leading sektor dalam program Kampung KB juga melakukan koordinasi dengan

³ Undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 19 ayat 2.

⁴ Ibid.

pemerintahan kota, kecamatan sampai ke tingkat kelurahan. Dalam Hal ini dapat dilihat dari bagan berikut :

Gambar 1.1 Koordinasi Provinsi Sampai Tingkat Kelurahan



Sumber : Olahan Peneliti

Program Kampung KB diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kinerja program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dan meningkatkan keterpaduan lintas sektor dalam intervensi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat⁵.

Program Kampung KB terus dikembangkan disetiap wilayah di Indonesia termasuk wilayah Sumatera Barat. Agar terlaksananya program ini secara

⁵ BKKBN, Pedoman Pengelolaan Kampung KB 2017, hlm 1.

keseluruhan maka Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 476/313/DPPKBKPS.3/V-2017 Tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Keluarnya surat edaran tersebut dibentuklah Kampung KB di tiap-tiap kecamatan di 19 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat.

Kampung KB di Sumatera Barat mulai terbentuk dari tahun 2017 yang mana terdapat 19 Kampung KB yang terdiri dari satu Kampung KB di setiap Kabupaten/Kota. Kemudian pada tahun 2018, Kampung KB mulai dikembangkan sampai di tingkat kecamatan dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat⁶. Dari rekapitulasi data Kampung KB se-Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Agustus 2019 sudah terbentuk sebanyak 396 kampung KB⁷.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat⁸.

Pada dasarnya terdapat 3 hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu ketersediaan data kependudukan yang akurat, dukungan dan komitmen pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, untuk memilih sebuah kampung untuk dijadikan Kampung KB setidaknya mencakup dua hal. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera

⁶ M Noli Hendra, 2019 *BKKBN Sumbar tidak bentuk Kampung KB*. (<https://www.cendananews.com/2019/08/2019-bkkbn-sumbar-tak-bentuk-kampung-kb.html> . Diakses pada 01/02/2020).

⁷ Ibid.

⁸ BKKBN, Pedoman Pengelolaan Kampung KB 2017, hlm 13.

dan KS1 (miskin) diatas rata-rata Pra Sejahtera dan KS1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada⁹. Ketentuan wilayah untuk membentuk Kampung KB ada 10 kategori wilayah yakni kumuh, pesisir, daerah aliran sungai (DAS), bantaran kereta api, kawasan wisata, padat penduduk¹⁰.

Kabupaten/Kota dengan penduduk terpadat di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang. Yang mana jumlah populasi penduduk sebanyak 939.112 jiwa¹¹. Kampung KB pertama di Kota Padang adalah Kampung KB Bangau Putih yang terletak di RW 17 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah. Kampung KB Bangau putih RW 17 terpilih menjadi *Pilot Project* di Kota Padang karena Kampung KB Bangau Putih RW 17 adalah Kampung KB pertama di Kota Padang. RW 17 terpilih menjadi Kampung KB karena terbilang RW 17 adalah daerah yang tertinggal dan tingkat kesejahteraan warganya yang masih rendah. Kampung KB Bangau Putih juga menjadi Kampung KB percontohan oleh Kampung KB lainnya.

Sasaran kegiatan pelaksanaan kegiatan operasional Kampung KB tidak hanya keluarga. Lansia, remaja, dan juga keluarga yang memiliki balita, keluarga memiliki remaja, dan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang melaksananya. Pembentukan Kampung KB pada prinsipnya merupakan perwujudan dari sinergi antar beberapa kementerian

⁹ M Noli Hendra, 2019 *BKKBN Sumbar tidak bentuk Kampung KB*. (<https://www.cendananews.com/2019/08/2019-bkkbn-sumbar-tak-bentuk-kampung-kb.html> . Diakses pada 01/02/2020).

¹⁰ Ibid.

¹¹ BPS Sumatera Barat.

terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat¹².

Kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Sehingga Kampung KB ini dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya mengubah sikap, perilaku, cara berpikir, masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, terutama yang miskin akan sumber daya, kaum perempuan, dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri dimana masyarakat ikut berperan sebagai aktor dalam pemberdayaan.

Menurut Kartasmita, pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan. Pertama, Upaya itu harus terarah yang ditujukan langsung pada masyarakat, kedua mengikutsertakan masyarakat yang akan menerima manfaat, ketiga, menggugulkan pendekatan kelompok, yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan

¹²Ibid.

kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan di pelihara secara saling menguntungkan dan memajukan¹³.

Terkait dengan hal tersebut, Program Kampung KB merupakan suatu program yang melakukan proses pemberdayaan yang terarah kepada masyarakat. Melalui program ini pemerintah melakukan upaya-upaya yang terarah yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan observasi lokasi dulu sebelum menentukan kegiatan dan program apa yang akan diberikan. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terus dilakukan di wilayah ini. Berbagai macam kegiatan pelatihan dan pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat di Parupuk Tabing dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat di wilayah itu. Namun pada kenyataannya, masyarakat rw 17 masih kurang berpartisipasi dalam hal menerima berbagai kegiatan program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama koordinator Kampung KB rw 17 pada tanggal 10 September 2019:

“Program kampung KB ini adalah program dari pemerintah untuk masyarakat agar kesejahteraan masyarakat disini lebih baik, namun masyarakat disini masih belum mau aktif dalam program pemberdayaan ini. Padahal berbagai kegiatan sudah ibu lakukan tetapi masyarakatnya tidak mau ikut dalam kegiatan tersebut. Masyarakat hanya mau ikut dalam kegiatan yang mendapatkan snack, makanan, atau uang. Kadang sudah ibu kasih pelatihan menjahit dan juga udah ibu sediakan alatnya, namun mereka tidak ada yang menjalankan. Ada juga masyarakat yang aktif, tapi hanya beberapa saja. Kendalanya yaa disitu saja. Diluar daei anggaran yang minim, partisipasi masyarakat untuk diberdayakan sangat kurang. Misalnya dikasih sosialisasi sekarang, sosialisasi berikutnya

¹³ Totok mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm 163.

tidak datang. Jadi disititu kendala nya, yang datang sosialisasi orangnya ganti-ganti.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan ini terkendala oleh partisipasi masyarakatnya yang kurang. Masyarakat hanya mau ikut program pemberdayaan melalui Kampung KB ini ketika adanya imbalan dikasih uang atau makanan. Padahal program pemberdayaan melalui Kampung KB ini tujuan nya adalah mensejahterakan masyarakat dari berbagai program kegiatan yang diberikan.

Program Kampung KB dapat menjadi suatu langkah pemberdayaan dari pemerintah kepada masyarakat untuk tidak lagi hanya mengurus, mencegah, mengatasi ataupun menyuruh setiap keluarga dengan cukup punya anak dua. Tetapi program Kampung KB telah terpadu secara menyeluruh. Yakinnya dengan, memasuki ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan, meningkatkan pendapatan, pendidikan, kesehatan yang kesemuanya masuk ke dalam program KB. Adapun kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB adalah terkait fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial dan budaya, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan. Hal ini juga dikatakan oleh Kabid KB-K3 Dinas P3AP2KB dalam wawancara peneliti pada tanggal 2 September 2019 :

“Kampung KB itu bukan hanya mensosialisasikan tentang KB saja , akan tetapi program Kampung KB itu tujuan nya untuk mensejahterakan masyarakat. Kampung KB melakukan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Elfian Kepala Bidang KB-K3 Dinas P3AP2KB Kota Padang 2 September Pukul : 10:00 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program Kampung KB nantinya diharapkan mampu mengatasi peningkatan jumlah penduduk serta mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga Kota Padang yang saat ini memiliki Kampung KB di setiap kecamatan, menjadi percontohan untuk kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat¹⁴. Tidak hanya mampu mengatasi peningkatan jumlah penduduk saja, Kampung KB berupaya memberdayakan masyarakat perkampungan baik itu dari bidang sosial budaya, agama, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, masyarakat setempat masih kurang berpartisipasi pada program pemberdayaan melalui Kampung KB ini, karena masyarakat kurang mengetahui manfaat dari program Kampung KB. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga rw 17 Parupuk Tabing.

“Setau saya Kampung KB disini memang sudah banyak kegiatannya seperti pelatihan dan penyuluhan. Namun menurut saya pelatihan yang diberikan tidak ada manfaat bagi saya, karena membuang waktu saja. Dari pada mengikuti pelatihan, mending saya mencari nafkah”. (Wawancara dengan warga RW 17,12 Februari 2020 pukul 17:00).

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti bersama salah satu warga rw 17 Kelurahan Parupuk Tabing.

“Kegiatan kampung KB disini hanya banyak pelatihan dan penyuluhan saja. Ibuk belum merasakan dampak perubahan ekonomi semenjak adanya kampung KB disini. Mungkin kedepan

¹⁴ Intan Suryani, *Maksimalkan Program KKBPK di Kampung KB*. (<https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/111930/maksimalkan-program-kkbpk-di-kampung-kb> . diakses pada 17/01/2010).

nya kampung KB bisa memberikan program yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat”. (Wawancara dengan Ibu Ira warga RW 17 12 Februari 2020 pukul 17:00).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tujuan dan manfaat kampung KB. Masyarakat lebih memilih mencari nafkah dari pada mengikuti pelatihan yang diberikan pemerintah. Masyarakat hanya melihat banyaknya kegiatan namun tidak merasakan dampak terhadap ekonomi dan kesejahteraan dari adanya kampung KB.

Untuk itu pemerintah diharapkan mensosialisasikan manfaat program pemberdayaan ini kepada masyarakatnya agar menumbuhkan rasa kesadaran diri akan penting dan banyaknya manfaat program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung KB di Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Merujuk pada paparan diatas, maka diambil rumusan masalah guna pembahasan sebagai batasan penelitian yaitu Bagaimana Bentuk Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung KB di Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan masalah tentang hal yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian dengan cara mempertimbangkan masalah yang terjadi dan membandingkan dengan yang seharusnya. Dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung KB di Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yang nantinya memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khasanah keilmuan pengetahuan administrasi publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian tentang Ilmu Administrasi Publik terutama pada konsentrasi Manajemen Publik, yaitu tentang melihat Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung KB di Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap teori Manajemen publik.

Selain itu penelitian juga berfungsi sebagai bahan referensi atau sebuah acuan yang relevan bagi penelitian yang selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang terkait dengan yang penulis lakukan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep maupun untuk

meningkatkan pengetahuan-pengetahuan bagaimana proses analisis kebijakan dilakukan.



1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Padang melaksanakan suatu kebijakan yang sudah ada, apakah kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai dengan mana mestinya atau justru sebaliknya.

